

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pada bab satu ini penulis akan membahas mengenai pendahuluan. Bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab, antara lain sebagai berikut: latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, hipotesis, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan. Sub bab tersebut masing-masing akan dipaparkan sebagai berikut:

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Myanmar merupakan negara yang kaya akan keragaman etnis, dan agama. Etnis yang paling dominan di Myanmar adalah Bamar, Shan, Kayni, Rakhine, Chinese, Mon, dan Kachin dan Budha sebagai agama yang paling mendominasi di Myanmar<sup>1</sup>. Etnis Rohingya merupakan salah satu etnis yang tinggal di Myanmar yang beragama Islam, akan tetapi mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar serta mengalami diskriminasi oleh pemerintah Myanmar. Etnis Rohingya tersebut menempati wilayah Arakan yang juga dihuni oleh etnis Rakhine, akan tetapi hubungan antara keduanya tidak harmonis. Pada Mei 2012, terjadi konflik antara etnis Rohingya dengan etnis Rakhine. Konflik tersebut bermula ketika beredar foto hasil forensik mengenai pembunuhan terhadap perempuan etnis Rakhine pada 28 Mei 2012 yang dilakukan oleh tiga pemuda etnis Rohingya yang membuat Para Bhiksu dan masyarakat etnis

---

<sup>1</sup>[www.oxfordburmaalliance.org](http://www.oxfordburmaalliance.org) 2009, <http://in.reuters.com2013>

Rakhine berdemonstrasi “No Rohingya”, dengan membunuh etnis Rohingya, merusak bangunan ibadah, dan merusak tempat tinggal. Konflik tersebut mengakibatkan lebih dari 70 orang meninggal, lebih dari 3.000 bangunan rusak, dan hampir 60.000 orang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi ke Malaysia, Thailand dan Indonesia<sup>2</sup>. Pemberitaan mengenai konflik Rohingya pada tahun 2012 mulai menghiiasi sejumlah media massa nasional bahkan internasional, aksi kekerasan etnis Rakhine yang menyerang etnis Rohingya menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap kelompok minoritas muslim Rohingya di Myanmar yang telah menyita perhatian publik internasional<sup>3</sup>. Eskalasi konflik yang meningkat antara Buddha Arakan dengan muslim Rohingya memberikan gambaran yang buruk mengenai keseriusan pemerintah Myanmar dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia<sup>4</sup>. Kekerasan yang terjadi di Myanmar tersebut memaksa etnis Rohingnya berada dalam keadaan darurat, tepatnya pada 10 Juni 2012 penduduk etnis Rohingnya mengungsi ke wilayah negara lain di Asia Tenggara, seperti Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan penduduk Muslim terbesar yang memiliki keprihatinan khusus dengan kejadian tersebut. Konflik horizontal tersebut memicu sejumlah media massa yang menyoroti perkembangan terkini terkait isu konflik etnis Rohingya. Beberapa organisasi dunia pun tidak tinggal

---

<sup>2</sup>[www.rohingya.org](http://www.rohingya.org) 2013

[www.bbc.co.uk](http://www.bbc.co.uk) 2012

<sup>3</sup>(*Kompas*, 12 Juni 2012).

<sup>4</sup>Aungsan, *Killing of Traveling Bengali Muslims in Taung-goke*, <http://www.salem-news.com/articles/august112012/blood-trails-myanmar-tk.php>

diam seperti Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) juga turut memperjuangkan nasib etnis Rohingya di Myanmar. Sejumlah surat kabar nasional di Indonesia pun turut menyajikan informasi seputar konflik tersebut bahkan dalam pemberitaan pada salah satu artikel yang menyatakan bahwa larangan langsung dalam ajaran Buddha (*Theravada*) bagi para bhiksu untuk berpolitik sehingga para bhiksu merasa berhak terlibat dalam pengusiran Rohingya. Dalam artikel tersebut lebih dijelaskan lagi bahwa Rohingya bukan merupakan bagian Myanmar<sup>5</sup>.

Berdasarkan uraian di atas Pemerintah Indonesia melalui presiden Joko Widodo pernah menyampaikan sikap empatinya melalui media nasional dan internasional mengenai sikap pemerintah Myanmar yang melakukan diskriminasi sosial serta agama kepada etnis Rohingnya. Dan Jokowi pun sudah dengan jelas menyatakan sikapnya tentang pengungsi Rohingnya yaitu “utamakan kemanusiaan” perintah Jokowi kepada bawahannya perihal pengungsi Rohingnya<sup>6</sup>. Presiden Jokowi juga berjanji akan melakukan negosiasi dengan pemerintah Myanmar untuk kembali menerima keberadaan etnis Rohingnya yang hingga saat ini masih berada di Indonesia dikarenakan mereka melarikan diri dari Myanmar sebagai bentuk perlindungan diri mereka terhadap sikap Myanmar yang melakukan penekanan sosial, agama serta politik yang mengancam jiwa raga mereka sehingga mengambil keputusan untuk mencari suaka ke Indonesia. Dan menurut Front Pembela Islam (FPI) Aceh pemerintah

---

<sup>5</sup>((Republika)

<sup>6</sup> m.kompasiana.com/muhammadaqila/soal-rohingnya-jokowi-utamakan-kemanusiaan\_5563d0a0e122bdb110f216d0

Indonesia tidak perlu mengembalikan pengungsi Rohingnya, karena dikhawatirkan mereka akan mendapatkan siksaan yang lebih sadis.<sup>7</sup>

Di satu sisi, Pemerintah Indonesia nampak belum melakukan komunikasi intensif dengan Pemerintah Myanmar menyangkut keberadaan pengungsi Rohingnya yang berada di Aceh. Presiden Jokowi masih berfokus pada urusan kepentingan dalam negeri dan belum berperan aktif dalam menyelesaikan kasus penempatan etnis Rohingnya di Indonesia. Di lain pihak, sebagian besar masyarakat Indonesia meminta Presiden Jokowi segera melakukan pertemuan intensif dengan Pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan kasus penempatan etnis Rohingnya tersebut.

Di satu sisi, pemerintah Indonesia hingga saat ini juga belum dapat merealisasikan penyelesaian kasus penempatan Rohingnya di Negara Myanmar kembali mengingat kondisi pemerintah Myanmar hingga kini belum mengakui etnis Rohingnya sebagai penduduknya. Pemerintah Myanmar memperkenalkan kartu identitas untuk warga negara Myanmar, tetapi menolak untuk memberikan kartu identitas tersebut kepada etnis Rohingnya<sup>8</sup>.

Ribuan orang dari etnis Rohingnya mencoba untuk melarikan diri setiap tahun ke Bangladesh, akan tetapi pemerintah Bangladesh enggan menerima mereka dan menolak atas keberadaan etnis tersebut. Etnis Rohingnya yang sangat rentan terhadap tindak diskriminasi serta penindasan mencoba melarikan diri dan mencari perlindungan untuk mendapatkan hak mereka sebagai warga

---

<sup>7</sup> [m.jpnn.com/news.php?id=304860](http://m.jpnn.com/news.php?id=304860)

<sup>8</sup> (M. Ali Kettani, 2005:207-208)

Negara<sup>9</sup>. Hal tersebut yang menjadikan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam merencanakan tindakan yang tepat dan efektif untuk dapat mencapai tujuan yaitu etnis Rohingnya dapat diterima kembali oleh pemerintah Myanmar.

Pemerintah Indonesia melalui Presiden Jokowi telah berkaca pada dunia internasional yang pernah berperan dalam permasalahan etnis Rohingnya di Myanmar yaitu OKI (*Organisasi Konferensi Islam*) sebagai organisasi dengan anggota negara-negara muslim yang berempati untuk melakukan langkah-langkah nyata dalam upaya mencari jalan keluar atas permasalahan yang terjadi pada umat minoritas muslim di Myanmar tersebut telah mengupayakan seoptimal mungkin untuk menghilangkan pemisahan rasial, diskriminasi serta kolonialisme dalam berbagai bentuk sebagai tujuan OKI (*Organisasi Konferensi Islam*) juga tidak terlepas dari hambatan diantaranya hambatan yang datang dari pemerintah dan masyarakat Myanmar itu sendiri<sup>10</sup>.

Presiden Jokowi sebagai presiden Indonesia dalam usaha untuk melakukan penempatan kembali etnis Rohingnya di Myanmar juga telah melihat peran ASEAN (*Association of Southeast Asia Nations*) sebagaimana diketahui ASEAN dianggap sebagai salah satu instrumen yang mampu menjaga kestabilan dan keamanan kawasan. ASEAN menerapkan fungsinya dalam menjaga perdamaian antar bangsa di Asia Tenggara melalui persoalan Rohingnya di Myanmar. Konflik ini telah berlangsung sejak sebelum Myanmar bergabung

---

<sup>9</sup><http://jaringnews.com/internasional/asia/25719/kasus-rohingya-lebih-buruk-dari-apartheid-afrika-selatan-pada--an>

<sup>10</sup><http://news.okezone.com/read/2012/08/15/411/677820/oki-dukung-asean-tuntaskan-isu-rohingnya>

dengan ASEAN dan kini permasalahan etnis Rohingya di Myanmar menjadi tantangan pembuktian kredibilitas ASEAN karena penyelesaian konflik Rohingya di bawah mekanisme ASEAN ini masih memiliki beberapa rintangan yaitu prinsip non-intervensi yang dipegang oleh ASEAN dan negara anggotanya. Prinsip non-intervensi ini melarang negara anggota ASEAN untuk melakukan intervensi langsung pada permasalahan domestik suatu negara. ASEAN juga merasa khawatir ketika permasalahan Rohingnya menjadi pengecualian bagi penerapan prinsip non-intervensi di kawasan ASEAN.

Presiden Jokowi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Myanmar juga tidak terlepas dari organisasi PBB melalui UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) yang menganggap permasalahan ini menjadi salah satu isu internasional sebab sikap pemerintah Myanmar yang tidak memberikan kesempatan pihak luar untuk memberikan bantuan. Etnis Rohingya yang tertekan terhadap sikap diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar mencoba mencari perlindungan dinegara tetangga,hal inilah yang mendasari PBB melalui badan internasional UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) memberikan bantuannya. UNHCR(*United Nations High Commissioner for Refugees*) juga memberikan keamanan dan hak dari para pengungsi,menjamin bahwa setiap orang berhak untuk mencari suaka,mendapat tempat yang aman di wilayah lain ataupun di Negara lain. Selain itu UNHCR juga memberikan jaminan pada orang – orang yang tidak memiliki kewarganegaraan maupun bekas pengungsi di Negara lain yang sudah merasa

aman untuk kembali ke negaranya. Bantuan yang diberikan oleh UNHCR ini membutuhkan kemitraan yang melibatkan pemerintah, bantuan kemanusiaan dan badan-badan pembangunan, masyarakat sipil, termasuk LSM, bersama dengan pengungsi itu sendiri. Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa Dewan PBB melalui UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) belum bisa menjalankan fungsi dan perannya secara maksimal karena pemerintah Myanmar yang seharusnya ikut bekerjasama dengan UNHCR juga tidak mampu terlibat di dalamnya dan memberikan kesan menolak program kemanusiaan dari UNHCR tersebut<sup>11</sup>.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pemerintah Indonesia melakukan kebijakan diplomatis terhadap penempatan kasus rohingya mengingat beberapa organisasi seperti ASEAN, OKI dan PBB diketahui belum mampu mengatasi konflik etnis rohingya di Myanmar yang menjadi isu dunia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan suatu permasalahan yaitu: “faktor-faktor apa yang membuat pemerintah Indonesia menginginkan agar pemerintah Myanmar menerima kembali pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia ?”

---

<sup>11</sup><http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home>

## C. Landasan Teori

### Konsep Diplomasi

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan konsep Diplomasi. Pada tataran ini konsep diplomasi digunakan sebagai acuan tingkatan dalam proses pencapaian kepentingan nasional Indonesia yakni dalam usaha penempatan kembali pengungsi rohingya di Myanmar. Kemampuan diplomasi Indonesia akan menentukan peran serta Indonesia dalam masalah-masalah internasional.

Menurut Earnest Satow (1796), kata diplomasi pertama kali disebutkan dalam Bahasa Inggris yang menunjukkan artian keahlian dan keberhasilan melakukan hubungan internasional dan perundingan<sup>12</sup>. Hingga dari waktu ke waktu kata dan praktek diplomasi semakin luas dan dirasakan serta dekat dengan masyarakat, terlebih masyarakat saat ini.

Menurut Roy Olton dan Jack C. Plano dalam buku *Internasional Relations Dictionary* Diplomasi secara teori yaitu praktek pelaksanaan hubungan antar negara melalui perwakilan resmi. Diplomasi merupakan teknik operasional untuk mencapai kepentingan nasional di luar wilayah yurisdiksi sebuah negara<sup>13</sup>. Bagi negara manapun, tujuan diplomasi adalah pengamanan kebebasan politik dan integritas teritorialnya. Ini bisa dicapai dengan memperkuat hubungan dengan negara lain. Beberapa ahli menyimpulkan, unsur diplomasi yaitu negosiasi yang

---

<sup>12</sup>Earnest Satow. *A Guide to Diplomatic Practice*. Dikutip dalam S.L Roy. *Diplomacy*. Diterjemahkan oleh Harwanto dan Misrawati (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 2.

<sup>13</sup>Roy Olton dan Jack C. Plano. *Internasional Relations Dictionary*. Diterjemahkan oleh Wawan Juanda. (Jakarta: Putra A. Bardhin CV. Cetakan Kedua, 1999), 201.

dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional dengan tindakan-tindakan diplomatik yang diambil untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin bisa dilaksanakan dengan sarana damai, pemeliharaan perdamaian tanpa merusak kepentingan nasional adalah tujuan diplomasi<sup>14</sup>.

Semakin kuat suatu negara dalam arti tingkat kemajuan dan kemakmuran, maka negara itu makin dipercaya, dihargai dan diperhitungkan dalam percaturan internasional yang otomatis mendukung suatu upaya diplomasi. Diplomasi pada hakikatnya merupakan praktek komunikasi antar negara dalam merundingkan berbagai kepentingan permasalahan, baik itu yang sifatnya dua negara (bilateral) maupun banyak negara (multilateral). Menurut Evans Diplomasi bilateral diartikan sebagai hubungan internasional merujuk kepada hubungan dua negara serta diplomasi bilateral dilakukan oleh dua negara dan secara tertutup ataupun rahasia<sup>15</sup>.

Dalam buku Sukawarsini Djelantik (2008) dijelaskan bahwa diplomasi multilateral merupakan sebuah fenomena yang sudah ada sebelum diplomasi menjadi kajian dalam London School of Economics<sup>16</sup>.

Menurut Brian White dalam buku *The Globalization of World Politics : An Introduction to International Relation*, diplomasi terbagi menjadi dua yaitu diplomasi tradisional dan diplomasi modern yang dinyatakan dengan beberapa karakteristik dari diplomasi *tradisional* yaitu diplomasi tradisional cenderung

---

<sup>14</sup> S.L Roy, Op. Cit., hlm. 8.

<sup>15</sup> (Evans, 1998:50)

<sup>16</sup> (Djelantik 2008)

lebih bersifat pada suatu bentuk proses komunikasi antara negara satu dengan negara lain secara official daripada bentuk organisasi politik lainnya sehingga diplomasi jenis ini juga sering disebut dengan *first-track diplomacy* atau *state-based activity*. Selanjutnya secara tradisional, diplomasi ini diatur pada suatu dasar hubungan bilateral yang besar dan biasanya dilakukan secara rahasia serta dikarakteristikkan oleh peraturan dan prosedur yang khusus. Diplomasi tradisional menjadi lebih mudah untuk menjaga segala negosiasi secara rahasia. Dalam diplomasi tradisional juga dikenal sejumlah hak, keistimewaan dan kekebalan yang diberikan pada diplomat serta semua aktivitas diplomatik. Berdasarkan agendanya, diplomasi tradisional memiliki agenda yang berorientasikan high politics, seperti isu perang, perjanjian perdamaian, serta batas-batas Negara.

Pemahaman karakteristik diplomasi secara *modern* dapat diasumsikan bahwa teori ini lebih bersifat terbuka pada publik sehingga meminimalisir prasangka buruk. Dengan diubahnya diplomasi tradisional menjadi diplomasi modern atau dikenal sebagai *second-track diplomacy*, secara otomatis membuat proses diplomasi menjadi aktivitas yang lebih rumit karena tidak hanya melibatkan peran pemerintah dalam menjalankan misi diplomasi, namun juga melibatkan lebih dari satu aktor, baik aktor *Intergovernmental Organization, Non-Governmental Organization, MNC* dan bahkan individu. Diplomasi modern ini tidak hanya memiliki agenda yang berkenaan dengan *high politics*, namun juga memiliki agenda yang bersifat *low politics*, seperti masalah ekonomi, sosial dan isu kesejahteraan karena pada diplomasi jenis ini,

penghindaran terjadinya perang menjadi prioritas utama. Dalam diplomasi modern ini, negara masih melanjutkan diplomasi bilateral dengan negara lain, namun di samping itu, ada pula diplomasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok negara secara multilateral, salahsatunya melalui PBB<sup>1718</sup>.

Buku terjemahan yang berjudul “Diplomasi” oleh S.L Roy yang berasal dari buku aslinya yang berjudul “Diplomacy”, tahun 1995 menurut S.L Roy (1984) diplomasi adalah

*“Seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin dalam hubungan dengan negara lain, jika damai gagal cara ancaman untuk kekuatan nyata diperbolehkan”<sup>19</sup>.*

Menurut S.L Roy, terdapat beberapa metode dalam dunia diplomasi. Metode ini kemudian memiliki beberapa teknik atau tatacara tersendiri dalam mengaplikasikan diplomasi secara utuh.

#### **a. Diplomasi Konferensi**

Konferensi merupakan pembaharuan mendasar yang kemudian menjadi praktek yang biasa dalam perundingan internasional hingga akhirnya menjadi arena konferensi internasional yang permanen di Majelis Umum PBB untuk membahas berbagai macam agenda diplomasi, selain perang.

---

<sup>17</sup>Baylis, John & Smith, Steve. (1998). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relation*. New York: Oxford University Press.

<sup>18</sup> Effendy, Tony Dian. (2008). *E-Diplomacy Sebagai Sarana Promosi Potensi Daerah Kepada Dunia Internasional*.

<sup>19</sup>S.L Roy, Op. Cit., hlm. 5.

Dalam konferensi internasional, persiapan dan pembicaraan pendahuluan akan memantapkan dasar-dasar bagi persamaan tujuan dan nilai dan persamaan pengertian sebagai teknik dalam konferensi agar berhasil<sup>20</sup>. PBB memberikan kerangka yang memungkinkan pelaksana konferensi internasional mendiskusikan masalah-masalah yang mendesak dan membutuhkan kesepakatan yang cepat<sup>21</sup>.

#### **b. Diplomasi Preventif**

Dalam diplomasi juga dikenal istilah *preventive diplomacy*. Istilah ini digunakan oleh sekjen PBB pada era Perang Dingin tahun 1960-an. Preventif diplomasi merupakan satu metode diplomasi yang digunakan untuk mencegah perselisihan yang timbul antar negara atau yang timbul antara pemerintahan dan kelompok minoritas, mencegah agar konflik tidak menjadi terbuka, menyebar dan apabila mungkin diperkecil<sup>22</sup>.

Instrumen dalam preventif diplomasi yaitu langkah pada masa damai (peace-time measures) dengan mencegah terjadinya konflik dengan mencari informasi, sejarah dan fakta-fakta mengenai penyebab muncul dan berkembangnya sebuah permasalahan, informasi inilah yang dianalisis untuk pengambilan keputusan pada masing-masing pihak<sup>23</sup>.

---

<sup>20</sup>Quincy Wright. *The Study of International Relations* (Bombay: Appleton-Century-Crofts, Inc. 1960), 282-283.

<sup>21</sup> S.L Roy, *Op. Cit.*, hlm. 146

<sup>22</sup> Mohammed Benjaoui. *The Fundamentals of Preventif Diplomacy* (New York : Routledge 2000), 29.

<sup>23</sup>Bantarto Bandoro. *ASEAN dan Diplomasi Preventif di Asia Pasifik*  
<http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/25696509518.pdf>

- I. Pembangunan kepercayaan diri, yaitu teknik pencegahan yang dirancang untuk mengurangi ketegangan yang terjadi antar pihak dengan membangun hubungan baik. Tiap pihak harus menunjukkan itikad baik untuk mengurangi terjadinya resiko dalam mencegah terjadinya konflik, niat baik itu bisa dalam bentuk kepercayaan, berbagi informasi untuk menunjukkan transparansi kebijakan.
- II. Pembangunan institusi yakni dengan cara membangun sebuah system kerjasama antar Negara untuk membicarakan persoalan yang terjadi.

Respon pada masa krisis (*crisis time responses*) Terdapat beberapa cara dalam hal ini, diantaranya :

- I. pencarian fakta, yaitu dengan pencarian dan penyelidikan fakta yang membuat terjadinya konflik tersebut, sehingga bisa mencari penyebab dari konflik tersebut. Laporan dari pencarian fakta ini diharapkan bisa menjadi dasar dari keputusan yang akan dibuat<sup>24</sup>. Pencarian fakta ini sendiri bermanfaat untuk meredakan ketegangan antar pihak yang berkonflik sampai ditemukan fakta- fakta yang sesungguhnya mengenai konflik tersebut.
- II. Good offices yaitu jasa- jasa baik dari pihak ketiga. Pihak ketiga berfungsi untuk mempertemukan pihak yang berkonflik untuk bersedia berunding. Jasa baik dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu jasa teknis yang berupa undangan kepada pihak yang berkonflik untuk ikut serta terlibat dalam konferensi atau menyelenggarakan konferensi, sedangkan jasa- jasa baik

---

<sup>24</sup> Andreas Pramudianto. *Diplomasi Lingkungan : Teori dan Fakta*, ( Jakarta: UI press.2008)

politis adalah upaya suatu Negara atau organisasi internasional dalam menghentikan konflik dengan negosiasi atau suatu kompensasi.

- III. Manajemen krisis, yaitu mencegah terjadinya konflik, ketika konflik tidak bisa terelakkan maka krisis manajemen berfungsi untuk mengurangi aksi-aksi kekerasan yang terjadi pada saat terjadinya konflik.

### c. Diplomasi Perjuangan

Diplomasi perjuangan adalah diplomasi yang ditopang oleh profesionalisme yang tangguh dan tanggap, yang tidak tersesat ke dalam birokratisme teknis yang sempit, maka diplomasi perjuangan harus aktif berprakarsa, kreatif dan asertif. Ketiga metode diplomasi tersebut untuk mempertegas pendapat bahwa diplomasi merupakan gejala yang mengandung unsur-unsur yang unik, yang hanya bisa dijelaskan dalam konteksnya. Setiap metode memiliki tujuan tertentu, karena itu penting untuk menekankan siapa yang mempraktekannya dan untuk tujuan apa itu dilakukan.

Keberhasilan di dalam diplomasi, bagaimanapun sangat dipengaruhi oleh kecakapan sang diplomat. *Harold Nicholson* dalam bukunya *Diplomacy* menjelaskan: *The characteristics a great diplomatist cannot be without are truth, accuracy, calm, patience, good temper, modesty and loyalty*<sup>25</sup>.Kejujuran, ketelitian, ketenangan, kesabaran, dapat memahan diri, rendah hati dan loyalitas.Harold juga mengatakan pentingnya sifat intelligence (kecerdasan),

---

<sup>25</sup> Harold Nicholson, *Op. Cit.*, hlm. 26-27.

pengetahuan (knowledge), kecerdikan (discernment), hati- hati (prudence), keramahan (hospitality).

Diplomat harus memahami lawan dan meletakkan argument yang benar pada saat yang tepat. Keterampilan memperhitungkan respon lawan terhadap imbalan dan ancaman, dan kemudian memberikan tawaran yang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Kemampuan meyakinkan pemerintahnya sendiri untuk menyokong usaha-usahanya<sup>26</sup>. Keberhasilan atau kegagalan politik luar negeri suatu Negara dengan demikian sangat bergantung pada kemampuan para diplomatnya untuk menjalankan diplomasi yang punya tujuan tertentu<sup>27</sup> mengubah perang menjadi perdamaian itulah tugas pokok para diplomat. Diplomat yang baik yaitu yang mampu menarik moral kedepan, memakai hukum untuk mengubah permusuhan menjadi persahabatan, menggeser kekuatan yang merusak dan berusaha mengatur segala yang membaikkan hidup.

Kemenangan sesungguhnya dari misi diplomatik tidak datang dari kemenangan berperang, melainkan kemenangan dalam mencegah perang<sup>28</sup> Kualitas seorang diplomat yang baik pada masa setelah perang dunia kedua, dengan banyaknya negara yang merdeka adalah kemampuan untuk

---

<sup>26</sup> AFK.Organski. *World Politics*, dikutip oleh S.L Roy. *Diplomacy*. Diterjemahkan oleh Harwanto, Misrawati (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 1995). 29

<sup>27</sup> S.L Roy, *Op. Cit.*, hlm. 36-37

<sup>28</sup> Rany Emilia, *Op. Cit.*, hlm. 6.

mempertahankan perdamaian melalui diplomasi di antara bangsa-bangsa tanpa mengorbankan kepentingan vital negaranya sendiri<sup>29</sup>.

Berdasarkan uraian konsep diplomasi diatas indonesia sangat dimungkinkan untuk melakukan upaya diplomasi pada pemerintah Myanmar melalui beberapa pendekatan secara tradisional yakni pendekatan dalam bentuk komunikasi dengan pemerintah Myanmar. Secara official dan dilakukan secara rahasia serta dikarakteristikan oleh peraturan dan prosedur yang khusus antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Myanmar. Selanjutnya upaya diplomasi Indonesia dengan menggunakan hubungan bilateral ini akan menjadi lebih mudah untuk menjaga segala negosiasi antara Indonesia dengan Myanmar yang tentunya akan tetap mempertahankan beberapa hak, keistimewaan dan kekebalan pada aktivitas diplomasi tersebut. Diplomasi bilateral yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia diketahui telah direalisasikan melalui pendekatan dengan menteri luar negeri dan wakil presiden RI terhadap presiden Myanmar agar terjalin komunikasi yang lebih intens dalam membahas konflik etnis Rohingya di Indonesia.

Di satu sisi Indonesia juga dapat melakukan karakteristik diplomasi yang bersifat modern atau yang dikenal dengan multilateral yakni Indonesia melakukan diplomasi dengan negara-negara yang tergabung dalam organisasi multilateral seperti PBB, OKI dan ASEAN dalam menyelesaikan konflik penempatan kembali etnis Rohingya di Myanmar.

---

<sup>29</sup> S.L Roy, *Op Cit.*, hlm. 217.

Indonesia dalam melaksanakan upaya diplomasi dengan pemerintah Myanmar juga harus melalui metode dan tehnik diplomasi yang tepat. Beberapa metode yang dapat dilakukan oleh Indonesia salah satunya adalah diplomasi konferensi dengan melakukan persiapan dan pembicaraan terlebih dahulu untuk memantapkan dasar-dasar bagi persamaan nilai dan tujuan melalui organisasi dunia seperti PBB sehingga dapat dihasilkan kesepakatan yang tepat antara pemerintah Indonesia dan Myanmar. Bentuk *diplomasi preventif* yang dilakukan oleh Indonesia bertujuan untuk mencegah perselisihan antar Negara atau antar pemerintahan serta kelompok minoritas yang dalam hal ini menyangkut kepentingan politik pemerintah Myanmar.

Indonesia dapat melakukan upaya diplomasi dengan pemerintah Myanmar dengan memperhatikan perilaku diplomasi yang tepat yakni dengan melibatkan percakapan seorang diplomat. Hal ini memungkinkan seorang diplomat harus memahami dan meletakkan argument yang tepat pada pemerintah Myanmar. Hal ini membutuhkan kemampuan dari para diplomat Indonesia untuk meyakini usaha-usahanya dengan bernegosiasi terhadap pemerintah Myanmar. Selanjutnya percakapan seorang diplomat seperti kemampuan untuk mengedepankan moral dan hukum dimungkinkan akan mengubah permusuhan menjadi persahabatan dengan Negara Myanmar.

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di tarik hipotesa mengenai faktor-faktor apa yang membuat pemerintah Indonesia menginginkan agar

pemerintah Myanmar menerima kembali pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia yaitu:

- faktor-faktor hak asasi manusia,
- perundang-undangan Indonesia tentang hubungan diplomasi bilateral – multilateral, dan
- tidak adanya penandatanganan konvensi pengungsi dari pemerintah Indonesia adalah alasan agar pemerintah Myanmar menerima kembali etnis Rohingya yang berada di Indonesia.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian mengenai Diplomasi Indonesia dalam usaha penempatan kembali pengungsi Rohingnya di Myanmar bersifat analitik karena peneliti menganalisa tentang bagaimana pemerintah Indonesia bersikap dalam menempatkan kembali para etnis rohingnya yang masih berada di Indonesia agar dapat mendapatkan tempat tinggal yang layak di Myanmar. Peneliti akan menganalisa tindakan yang tepat untuk pemerintah Indonesia dalam penempatan kembali etnis Rohingnya ke Myanmar dengan menggunakan konsep diplomasi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli sebelumnya. Selain itu peneliti juga akan melakukan analisis dengan menggunakan beberapa refrensi baik bersumber dari situs-situs internet yang membahas mengenai sejauh mana pemerintah Indonesia melalui presiden Jokowi telah bertindak dalam menyelesaikan kasus etnis Rohinnya yang masih terlantar di Indonesia.

## **F. Jangkauan Penelitian**

Penelitian mengenai Diplomasi Indonesia dalam usaha penempatan kembali pengungsi Rohingnya di Myanmar mengambil jangkauan bersifat observasi dengan mengamati sejauh mana upaya presiden Jokowi dalam menyelesaikan penempatan kembali etnis Rohingnya dengan melakukan negosiasi terhadap pemerintah Myanmar melalui beberapa sumber media seperti situs dan pemberitaan media cetak sehingga penulis akan mendapatkan dasar analisa apakah upaya tersebut dapat menyelesaikan kasus yang dihadapi Indonesia sehubungan dengan keberadaan etnis Rohingnya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Pada sistematika penulisan, peneliti akan menjabarkan penulisan tentang diplomasi Indonesia dalam usaha penempatan kembali pengungsi rohingnya di Myanmar dengan membagi menjadi 5bab yang terdiri dari :

Bab 1 yang berisi tentang latar belakang etnis Rohingnya yang mendapatkan perlakuan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh pemerintah Myanmar beserta beberapa peran dari organisasi ASEAN,PBB dan OKI yang diketahui telah melakukan tindakan diplomatis dengan pemerintah Myanmar yang berpengaruh pada kebijakan diplomatis pemerintah Indonesia selanjutnya. Pada bab ini peneliti juga merumuskan masalah terkait dengan kebijakan diplomasi penempatan kembali etnis Rohingnya di Myanmar oleh

pemerintah Indonesia berdasarkan konsep diplomasi dari beberapa ahli dan penyusunan hipotesis terkait dengan keefektifan kebijakan diplomatis pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus penempatan etnis Rohingya tersebut.

Bab 2 berisi tentang kondisi etnis rohingya di Myanmar yang dinilai melanggar Hak Asasi Manusia oleh masyarakat dunia.

Bab 3 berisi tentang dasar-dasar diplomasi dan Undang-Undang Indonesia yang mendasari kebijakan pemerintah dalam menangani penempatan kembali etnis Rohingya di Myanmar.

Bab 4 berisi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah Indonesia agar pemerintah Myanmar menerima kembali etnis Rohingya yang berada di Indonesia.

Bab 5 berisi tentang kesimpulan dari peneliti mengenai ketepatan tindakan diplomatis pemerintah Indonesia dalam menghadapi kasus penempatan Rohingnya di Myanamar serta beberapa saran untuk pemerintah Indonesia dan pemerintah Myanmar dalam menyikapi keberadaan etnis Rohingnya.